



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 376 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 376 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Agustus 2022
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttt

SUMADI



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2022**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan YME sehingga penyusunan Perubahan Rencaria Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi kebaikan penyusunan Renja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan Renja di tahun mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta berperan aktif dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Yogyakarta, 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Yogyakarta

ttd

Drs. AGUS WINARTO

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan dilakukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota.

Dokumen RKPD secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, program serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan pada RKPD memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam kaitannya dengan tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2022 serta mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022 yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota

Yogyakarta Tahun 2017-2022, Satpol PP menjadi salah satu pendukung dan menjadi bagian dalam mewujudkan misi Kota Yogyakarta yakni misi ke-3 pembangunan Kota Yogyakarta "Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta" dengan tujuan "Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat." Sasaran yang ditentukan yakni Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat dengan indikator kinerja sasaran "Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat." Dalam mewujudkan misi tersebut Satpol PP didukung oleh OPD terkait diantaranya yang mengampu bidang pemuda dan olahraga serta bidang kesatuan bangsa.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Yogyakarta selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat penjabaran dan visi, misi, dan program Walikota Yogyakarta, serta memuat arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, Strategi Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Kebijakan Umum dan Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Memperhatikan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketertiban, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan implementasi diberlakukannya otonomi daerah atas tuntutan masyarakat yang menginginkan hidup mandiri tanpa ketergantungan pada Pemerintah Pusat serta mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi pergeseran pagu kegiatan OPD, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Maka berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yakni:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka

untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 pada tanggal 25 Juli 2022, menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2022 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2022.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2022.

1.5 Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2022

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II :

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2022 sampai dengan Triwulan II

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Pada tahun 2022, pengukuran kinerja kegiatan dilaporkan secara rutin setiap triwulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran dalam Sistem Informasi Manajemen Pelaporan setiap bulan (laporan dinamis). Selain itu juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil renja setiap triwulan oleh Bappeda Kota Yogyakarta melalui SIM Monitoring dan Evaluasi (SIMONEVA).

Pengukuran kinerja tahun 2022 dilakukan setiap triwulan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan yang dijalankan pada sasaran tersebut. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II atau Semester I Tahun 2022 Satpol PP untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masing-masing program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada indikator program internal ini belum dapat disajikan data capaian program karena baru dapat terlihat dan Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada akhir tahun anggaran. Meskipun demikian dari hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada tahun anggaran 2021 didapatkan nilai SAKIP Satpol PP Kota Yogyakarta adalah 86,67 dengan predikat A (memuaskan). Dilihat dari perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II dapat diketahui capaian kegiatan pada program internal sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sampai dengan TW II realisasi fisik kegiatan adalah 100% telah sesuai dengan target. Untuk realisasi keuangan tidak/belum dilaksanakan karena kegiatan telah berjalan efektif tanpa harus menggunakan anggaran yang ada.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tidak optimalnya realisasi fisik dan keuangan pada kegiatan ini karena Efisiensi penggunaan BBM kendaraan dinas operasional menyesuaikan dengan penggunaan nil di lapangan. Di samping itu juga untuk biaya pemeliharaan peralatan kantor, terdapat beberapa peralatan dan mesin masih dalam kondisi baik sehingga tidak semua peralatan yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan;

Untuk keuangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan TW II ini telah terealisasi Rp8.004.380.676,32 dari target Rp14.733.034.532,00 (tingkat realisasi 54,32%). Terhadap target satu tahun mendapat capaian realisasi keuangan sebesar 44,16%.

2) Program Peningkatan Keterteraman dan Ketertiban Umum

Pada program utama Satpol PP Kota Yogyakarta ini diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

- a. Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3). Capaian kinerja program ini dengan diukur dengan indikator persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) dan dengan menggunakan rumus : $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi}} \times 100\%$

Sampai dengan Trwulan II 2022 telah terjaring 3275 pelanggaran perda dan perkara dan terselesaikan 3275 pelanggaran. Jumlah 3275 pelanggaran didapat dari pelanggaran K3 yang terjaring dan terselesaikan secara non yustisi sebesar 3185 pelanggaran dan secara yustisi sebesar 90 pelanggaran. Dari data tersebut didapat realisasi fisik program sebesar 100% terhadap target TW II 2022 yaitu 97,5%, sehingga tingkat realisasinya mencapai 102,56%.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja pada program ini yakni terdapat optimalisasi kinerja pejabat fungsional Satpol PP dan SDM pendukung kegiatan penegakan perda telah mencukupi. Untuk faktor penghambat kinerja diantaranya sarpras pendukung kegiatan penegakan perda yang

masih belum dapat terakomodir dan juga banyaknya peraturan daerah yang perlu ditegakkan menjadi kurang optimal dalam pelaksanaan penegakannya

- b. Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan rumus : Jumlah potensi gangguan tibumtranmas yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan tibumtranmas di Kota Yogyakarta. Sampai dengan TW II 2022 ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 97% dengan realisasi 100% dengan tingkat realisasi sebesar 103,09%. Faktor pendorong keberhasilan kinerja pada program ini adalah terdapat sinergitas petugas di lapangan dengan stakeholder dan instansi vertikal (TNI, Poln) dalam mencegah dan menanggulangi potensi konflik. Beberapa kendala yang dihadapi seringkali karena faktor eksternal yakni keadaan yang dinamis di lapangan yang dapat mempengaruhi terjadinya potensi konflik yang lebih besar (kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat)

- c. Persentase Peningkatan Kapasitas Pol PP

Capaian realisasi pada indikator ini adalah sebagai berikut :

- Rumusan pengukuran realisasinya adalah jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perundang-undangan. Realisasi untuk indikator ini adalah 97,65% atau capaian komposit kinerja pada indikator ini adalah 48,82% sesuai dengan target sampai dengan TW II.

$$\text{Rumus : } \frac{\sum \text{hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum}}{\sum \text{peraturan perundang-undangan}} \times 100\%$$

$$(\%) \text{ pengkajian : } \frac{83}{85} \times 100\% = 97,65 \%$$

- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang lulus samapta didapat dari jumlah anggota Pol PP yang lulus tes kesamaptaaan dibagi jumlah anggota yang mengikuti tes kesamaptaaan. Sampai dengan TW II, kegiatan ini belum terlaksana karena tatakal kegiatan dilaksanakan di Tribulan III dan IV. Dalam rangka mengukur capaian kinerja program menggunakan indikator Persentase peningkatan kapasitas Pol PP dengan formulasi penghitungan : (50% dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan

perUUan dikali 100%)+ 50% peningkatan kapasitas (jumlah komposit dari 25% dikali persentase realisasi anggota yang memahami peraturan ditambah 25% persentase realisasi anggota yang lulus samapta. Untuk kegiatan pemahaman peraturan perundang-undangan didapatkan realisasi peserta pemahaman peraturan lulus seluruhnya dengan capaian sebesar 100%. Sampai TW II 2022 ini telah terealisasi 73,82% dari target TW II sebesar 68,82% atau capaian kinerja 107,27%.

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja pada program ini antara lain terdapat antusiasme pegawai dalam kegiatan pengembangan kapasitas SDM dan SDM pengkaji peraturan perundang-undangan yang mencukupi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas SDM terkadang terhambat jadwal pelaksanaan kegiatan reguler pegawai

- d. Indikator Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat dengan rumus Penjumlahan realisasi komposit dari : 1. (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas) dengan bobot komposit 50%; 2. Pembentukan Kampung Panca Tertib bobot 20% dan Pembentukan Sekolah Panca Tertib bobot 5% 3. Penumbuhan Kampung Panca Tertib bobot 20% dan Penumbuhan Sekolah Panca Tertib bobot 5%.

- Terpenuhiya perlindungan masyarakat menggunakan indikator jumlah kampung yang sudah memiliki anggota linmas dengan kuota di dalam 1 RT terdapat minimal 1 orang petugas linmas. Hal tersebut juga merupakan penerapan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh kemendagri. Menurut data SIM Linmas kondisi eksisting di Kota Yogyakarta terdapat petugas linmas yang berjumlah 3823 personil dengan jumlah RT di Kota Yogyakarta sejumlah 2534 RT sehingga dari jumlah 170 kampung, rata-rata indikator kampung yang telah memiliki petugas linmas telah terpenuhi 100 %. Bobot nilai komposit dari terpenuhiya perlindungan masyarakat adalah 50 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 50 % dikali 100 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **50 %**.

- Realisasi Pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan TW II tahun 2022 telah terbentuk 119 Kampung Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang terbentuk adalah 70% yang merupakan hasil dari 119 kampung dibagi 170 kampung dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Kampung Panca Tertib adalah 20% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit

kegiatan adalah 20% dikali 70% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **14%**.

- Realisasi Pembentukan Pantib for school sampai dengan TW II tahun 2022 telah terbentuk 9 sekolah. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Pantib for school yang terbentuk adalah 90% yang merupakan hasil dari 9 sekolah panca tertib dibagi target 10 sekolah dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Pantib for school adalah 5% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20% dikali 90% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **4,5%**.
- Realisasi Penumbuhan Kampung Panca Tertib sampai dengan TW II tahun 2022 telah ditumbuhkan 119 Kampung Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang ditumbuhkan adalah 70% yang merupakan hasil dari 119 kampung dibagi 170 kampung dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Penumbuhan Kampung Panca Tertib adalah 20% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20% dikali 70% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **14%**.
- Realisasi Penumbuhan Pantib for school sampai dengan TW II tahun 2022 telah ditumbuhkan 9 sekolah. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Pantib for school yang ditumbuhkan adalah 90% yang merupakan hasil dari 9 sekolah panca tertib dibagi target 10 sekolah dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Penumbuhan Pantib for school adalah 5% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20% dikali 90% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **4,5%**.

Sampai dengan TW II 2022 telah terealisasi 87% dari target 93,88% (tingkat realisasi 103,71%). Faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pada program ini adalah tingginya animo masyarakat dalam kegiatan perlindungan masyarakat (peran serta aktif kegiatan Gerakan Panca Tertib dan keikutsertaan menjadi anggota linmas) . Kendala yang terkadang ditemui yakni koordinasi lintas OPD belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Panca Tertib dan juga jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat menyesuaikan agenda dari kampung bersangkutan.

Capaian kinerja sasaran Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Meningkat pada Satpol PP semester I Tahun 2022 sebesar 103,68% diperoleh dari realisasi 92,16% terhadap target 88,89%.

Realisasi sebesar 92,16% didapat dari akumulasi realisasi program yang terdiri dari penjumlahan komposit 30% realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3), 30% realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, 20% realisasi peningkatan kapasitas Pol PP, dan 20% realisasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Komposit Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) adalah $30\% \times 100\% = 30\%$
- Komposit realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah $30\% \times 100\% = 30\%$
- Komposit realisasi peningkatan kapasitas Pol PP adalah $20\% \times 73,82\% = 14,76\%$
- Komposit realisasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat adalah $20\% \times 87\% = 17,40\%$

Untuk keuangan pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sampai dengan TW II ini telah terealisasi Rp6.804.645.602,08 dari target Rp7.410.105.772,00 (tingkat realisasi 91,82%). Terhadap target satu tahun mendapat capaian realisasi keuangan sebesar 39,92%.

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja s.d Triwulan II Tahun Anggaran 2022 secara naratif dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar Rp35.170.815.589,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sejumlah Rp16.928.276.000,00, Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp18.242.539.589,00. Realisasi anggaran Satpol PP Kota Yogyakarta s.d TW II 2022 sebesar Rp14.809.026.278,40 atau sebesar 66,87% dari target s.d TW II (termasuk belanja pegawai) atau 42,11% dari total anggaran satu tahun.

Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah koordinasi internal setiap minggu, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran setiap bulan pendukung sasaran program sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan capaian sasaran Renstra OPD dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya/perubahan strategi dan rencana aksi. Faktor penghambat pelaksanaan kinerja sasaran diantaranya pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan permasalahan administrasi dengan pihak ketiga, kegiatan insidental, serta dinamisasi keadaan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan; Kebijakan terkait penatausahaan keuangan yang mempengaruhi serapan anggaran tidak optimal (misal terdapat penyempurnaan/revisi awal penjabaran APBD).

Dalam rangka meminimalisasi kendala/ hambatan, maka perlu dan telah diambil langkah tindakan sebagai berikut :

- 1) melaksanakan kegiatan secara optimal dengan ketersediaan sarpras pendukung yang ada, sehingga tidak terjadi deviasi baik keuangan maupun fisik pada triwulan berikutnya
- 2) Koordinasi lebih intensif dengan pihak penyedia dan stakeholder lain untuk menunjang optimalisasi realisasi fisik kegiatan dan keuangan
- 3) Penyesuaian ulang tatakala kegiatan dan percepatan pelaksanaan kegiatan
- 4) Penataan kembali tatakala kegiatan yang menjadi prioritas. Kegiatan yang belum terlaksana segera difaksanakan sesuai tatakala untuk memaksimalkan realisasi fisik dan penyerapan anggaran
- 5) Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan/ program, sehingga secara dini dapat diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya.
- 6) Optimalisasi seluruh sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
- 7) Perlu perencanaan yang lebih matang dan komprehensif dalam penentuan target fisik, tatakala kegiatan, dan perencanaan penganggaran dengan tetap berpedoman pada kegiatan prioritas sehingga capaian kinerja dapat tercapai secara optimal
- 8) Strategi proses penyampaian SPJ kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pihak ketiga perlu dievaluasi kembali
- 9) Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
- 10) Penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya dengan melihat trend maupun kecenderungan pada tahun sebelumnya, sehingga pencapaian pada triwulan awal tidak mengalami deviasi yang cukup signifikan, khususnya terkait dengan penyusunan kontrak lebih awal dengan penyedia jasa pihak ketiga

Evaluasi terhadap hasil renja Satpol PP Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat dalam lampiran Tabel 2.1.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAVONG PRAJA
TAHUN 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang terdapat pada rencana Perangkat Daerah:

1	Kualitas penyelenggaraan kearifan budaya dan keterampilan masyarakat masyarakat	Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi Unsur dan Komunitas Masyarakat	96,07%
---	---	---	--------

No.	Sumber PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Instrumen/ Kegiatan (Output)	Fokus Indikator Program	Target Capaian Kinerja Rencana SKPD pada Akhir Monev		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD s.d. HK/PD Tahun Laku (1- 12- 2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD s.d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD s.d Tahun 2021 (%)		Lusi SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Kuantitas	Fisik	Kuantitas	Target Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun 2021		Realisasi Rencana SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		Fisik	Kuantitas	Fisik	Kuantitas				
									Fisik	Kuantitas	Fisik	Kuantitas	Fisik	Kuantitas								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KARIPATEN-KOTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.765.784,00		589.504.682,00		488.108.644,22	0,00%	100,00%						
		Pencapaian Prinsip-prinsip dan Fasilitas Kinerja Perangkat Daerah																				
		1. Penyediaan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah				0,00	0,00			2.000.000,00	95,22%	1.430.000,00	91,34%	400.000,00	17,22%	360,00%						
			Dokumen Renc Tahun 2022, Ren Perubahan Tahun 2022, dan Renvis Rencana	0 Dokumen	0 Dokumen			1 Dokumen			95,22%		95,22%		100,00%							
			Formulir SPJ untuk Ketercapaian Pencapaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	0 Berkas Acara	0 Berkas Acara			1 Berkas Acara			95,22%		100,00%		144,47%							
		2. Kualitas dan Penyusunan Nilai-nilai SKPD				0,00	0,00			1.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			REK dan RKA OPD, DPA dan LAPORAN GPR	0 Dokumen	0 Dokumen			4 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
		3. Kualitas dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kinerja SKPD				0,00	0,00			12.470.112,00	44,72%	14.721.596,00	44,72%	14.100.100,22	100,00%	87,97%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelayanan dan Realisasi OPD Tahunan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2021	0 Dokumen	0 Dokumen			6 Dokumen			44,72%		44,72%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelayanan, dan Realisasi OPD	0 Dokumen	0 Dokumen			3 Dokumen			44,72%		44,72%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kinerja SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen			6 Dokumen			44,72%		44,72%		100,00%							
			Perencanaan Kinerja dan Pembinaan Pencapaian Kinerja	0 Dokumen	0 Dokumen			2 Dokumen			44,72%		44,72%		100,00%							
		4. Kualitas Kinerja Perangkat Daerah				0,00	0,00			1.000.000,00	82,30%	421.000,00	82,30%	0,00	100,00%	0,00%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen			4 Dokumen			82,30%		82,30%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00	0,00			30.000,00	30,00%	45.000,00	30,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0 Dokumen			2 Dokumen			30,00%		30,00%		100,00%							

		6. Pelaksanaan Penanaman dan Program Vertikal Kegiatan KSPD			0,00	0,00	80.000,00	20,00%	45.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Dalam Pelaksanaan Vertikal	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	80.000,00	20,00%	45.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		7. Kegiatan dan Pelaksanaan Manajemen KSPD			0,00	0,00	80.000,00	20,00%	47.000,00	30,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Akumulasi dan Pelaporan Kegiatan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	80.000,00	20,00%	47.000,00	30,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		8. Kegiatan dan Pelaksanaan Layanan Kegiatan Akadik Tahun KSPD			0,00	0,00	80.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Layanan Kegiatan Akadik Tahun	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	80.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		9. Pengujian dan Penerapan Sistem Terpadu Pembelajaran			0,00	0,00	417.000,00	32,80%	171.000,00	32,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Dalam Terpadu Pembelajaran	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	417.000,00	32,80%	171.000,00	32,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		10. Kegiatan dan Pelaksanaan Layanan Kegiatan Sistematika dan Sistem Simulasi KSPD			0,00	0,00	417.000,00	67,15%	281.000,00	67,15%	0,00	100,00%	0,00%							
			Layanan Kegiatan Sistematika dan Sistem Simulasi	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	417.000,00	67,15%	281.000,00	67,15%	0,00	100,00%	0,00%							
		11. Penyelenggaraan Kegiatan dan Akses Program, Realisasi Anggaran			0,00	0,00	80.000,00	20,00%	40.000,00	20,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Layanan Kegiatan Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	80.000,00	20,00%	40.000,00	20,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		Ministerial Umum Perangkat Bervak																		
		12. Penyelenggaraan Kegiatan dan Layanan Kegiatan Bervak Kantor			0,00	0,00	4.241.000,00	40,24%	1.681.000,00	39,20%	1.142.500,00	100,00%	100,00%							
			Kegiatan dan Layanan Kegiatan Bervak Kantor	0 jema	0 jema	6 jema	4.241.000,00	40,24%	1.681.000,00	39,20%	1.142.500,00	100,00%	100,00%							
		13. Penyelenggaraan Kegiatan dan Layanan Kegiatan Bervak Kantor			0,00	0,00	73.073.603,00	59,67%	43.071.125,00	58,27%	64.111.000,00	100,00%	100,00%							
			Alat Tulis Kantor	0 jema	0 jema	50 jema	73.073.603,00	59,67%	43.071.125,00	58,27%	64.111.000,00	100,00%	100,00%							
			Bahan Cetak	0 buah	0 buah	7 buah	73.073.603,00	59,67%	43.071.125,00	58,27%	64.111.000,00	100,00%	100,00%							
			Charge Kopier	0 buah	0 buah	2 buah	73.073.603,00	59,67%	43.071.125,00	58,27%	64.111.000,00	100,00%	100,00%							
			Cost Pk	0 buah	0 buah	1 buah	73.073.603,00	59,67%	43.071.125,00	58,27%	64.111.000,00	100,00%	100,00%							
			Printer	0 buah	0 buah	20 buah	73.073.603,00	59,67%	43.071.125,00	58,27%	64.111.000,00	100,00%	100,00%							
			Kabel LAN	0 buah	0 buah	5 buah	73.073.603,00	59,67%	43.071.125,00	58,27%	64.111.000,00	100,00%	100,00%							
			Keyboard	0 buah	0 buah	4 buah	73.073.603,00	59,67%	43.071.125,00	58,27%	64.111.000,00	100,00%	100,00%							
			Mouse	0 buah	0 buah	12 buah	73.073.603,00	59,67%	43.071.125,00	58,27%	64.111.000,00	100,00%	100,00%							
			Perangkat Bervak Lainnya	0 jema	0 jema	20 jema	73.073.603,00	59,67%	43.071.125,00	58,27%	64.111.000,00	100,00%	100,00%							
			Ballpoint	0 jema	0 jema	7 jema	73.073.603,00	59,67%	43.071.125,00	58,27%	64.111.000,00	100,00%	100,00%							
			Tempat pensil	0 jema	0 jema	4 jema	73.073.603,00	59,67%	43.071.125,00	58,27%	64.111.000,00	100,00%	100,00%							
			Unit komputer	0 buah	0 buah	1 buah	73.073.603,00	59,67%	43.071.125,00	58,27%	64.111.000,00	100,00%	100,00%							
		14. Penyelenggaraan Kegiatan dan Layanan Kegiatan Bervak Kantor			0,00	0,00	82.251.000,00	42,96%	36.427.500,00	31,00%	27.218.200,00	72,20%	74,51%							
			Bahan Cetak	0 jema	0 jema	12 jema	82.251.000,00	42,96%	36.427.500,00	31,00%	27.218.200,00	72,20%	74,51%							
			Pengembangan sistem komputerisasi	0 jema	0 jema	300.000 jema	82.251.000,00	42,96%	36.427.500,00	31,00%	27.218.200,00	72,20%	74,51%							
		15. Penyelenggaraan Kegiatan dan Layanan Kegiatan Bervak Kantor			0,00	0,00	2.445.000,00	49,90%	1.231.000,00	46,00%	1.626.000,00	92,00%	112,10%							
			Surat Kabar internal 17 jema	0 jema	0 jema	2 jema	2.445.000,00	49,90%	1.231.000,00	46,00%	1.626.000,00	92,00%	112,10%							
		16. Penyelenggaraan Kegiatan dan Layanan Kegiatan Bervak Kantor			0,00	0,00	11.360.000,00	79,96%	56.060.000,00	79,90%	44.965.174,00	100,00%	81,87%							
			Makan Minum Kantor	0 KUB	0 KUB	1.440 KUB	11.360.000,00	79,96%	56.060.000,00	79,90%	44.965.174,00	100,00%	81,87%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Daerah (RKKD)	0 KUB	0 KUB	4 KUB	11.360.000,00	79,96%	56.060.000,00	79,90%	44.965.174,00	100,00%	81,87%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Daerah (RKKD)	0 KUB	0 KUB	1 KUB	11.360.000,00	79,96%	56.060.000,00	79,90%	44.965.174,00	100,00%	81,87%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Daerah (RKKD)	0 KUB	0 KUB	1 KUB	11.360.000,00	79,96%	56.060.000,00	79,90%	44.965.174,00	100,00%	81,87%							

dan kemudian Lampiran

Proyeksi Jasa Peningkatan Urutan Pemrintahan Daerah

17. Proyeksi Jasa Sisa Monev				0,00	0,00		6.000.000,00	45,00%	2.750.000,00	45,83%	3.250.000,00	54,17%	17,82%
	Monev	0 Lembar	0 Lembar	300 Lembar				25,00%		50,00%	100,00%		
	Pengantar berita acara hasil monev	0 Lembar	0 Lembar	10 Lembar				40,00%		25,00%	54,17%		
	Kartu Kerja	0 Lembar	0 Lembar	20 Lembar				40,00%		40,00%	80,00%		
18. Proyeksi Jasa Audit (Kas/Rekening Dapur dan Listrik)				0,00	0,00		3.000.000,00	49,49%	2.300.000,00	45,00%	3.000.000,00	80,00%	49,29%
	Pembayaran rekening tagihan	0 Lembar	0 Lembar	12 Lembar				49,49%		45,00%	90,00%		
19. Proyeksi Jasa Pelayanan Urutan Kasir				0,00	0,00		150.000.000,00	49,99%	17.000.000,00	49,99%	150.000.000,00	100,00%	100,00%
	Jasa Cleaning Service	0 Lembar	0 Lembar	12 Lembar				49,99%		49,99%	100,00%		

Pembayaran Barang Milik Daerah Peningkatan Urutan Pemrintahan Daerah

20. Proyeksi Jasa Pemeliharaan/Pengelolaan Perencanaan dan Pengendalian Anggaran (Dana dan Kreditur Dana Jaban)				0,00	0,00		24.300.000,00	50,71%	42.000.000,00	48,75%	24.300.000,00	45,19%	64,28%
	Pembayaran Pajak, kerdanan peramping dan kreditur dana jaban nota 2	0 Lembar	0 Lembar	17 Lembar				50,71%		40,00%	90,71%		
	Pembayaran Pajak, kerdanan peramping dan kreditur dana jaban nota 4	0 Lembar	0 Lembar	1 Lembar				50,71%		90,00%	100,71%		
	Pembayaran pajak kerdanan peramping dan kreditur dana jaban nota 2	0 Lembar	0 Lembar	17 Lembar				50,71%		40,00%	90,71%		
	Pembayaran pajak kerdanan peramping dan kreditur dana jaban nota 4	0 Lembar	0 Lembar	1 Lembar				50,71%		90,00%	100,71%		
21. Proyeksi Jasa Pemeliharaan/Pengelolaan Sistem Keuangan (Dana Operasional dan Laporan)				0,00	0,00		200.250.000,00	52,00%	171.713.000,00	43,29%	200.000.000,00	45,00%	100,77%
	Pembayaran Pajak dan KIR kerdanan dan operasional anggaran nota 4	0 Lembar	0 Lembar	28 Lembar				52,00%		30,00%	82,00%		
	Pembayaran Pajak dan KIR kerdanan dan operasional anggaran nota 6	0 Lembar	0 Lembar	3 Lembar				42,00%		40,00%	82,00%		
	Pembayaran Pajak kerdanan dan operasional anggaran nota 2	0 Lembar	0 Lembar	27 Lembar				52,00%		54,29%	106,00%		
	Pembayaran pajak kerdanan dan operasional anggaran nota 2	0 Lembar	0 Lembar	27 Lembar				52,00%		40,00%	92,00%		
	Pembayaran pajak kerdanan dan operasional anggaran nota 4	0 Lembar	0 Lembar	28 Lembar				52,00%		40,00%	92,00%		
	Pembayaran	0 Lembar	0 Lembar	3 Lembar				52,00%		30,00%	100,00%		

		22	Peningkatan Performa dan Meas Lainnya			0,00	0,00			17.406.000,00	52,14%	9.073.000,00	11,52%	2.549.000,00	22,13%	26,81%										
			AC Spill	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit			52,14%		52,14%		100,00%												
			IT	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit			52,14%		52,14%		100,00%												
			Konrol	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit			52,14%		52,14%		100,00%												
			Komputer	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit			52,14%		52,14%		100,00%												
			Lampu	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit			52,14%		52,14%		100,00%												
			Monev	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit			52,14%		52,14%		100,00%												
			Peralatan Multimedia	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit			52,14%		52,14%		100,00%												
			Pengiriman	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit			52,14%		52,14%		100,00%												
			Printer	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit			52,14%		52,14%		100,00%												
		23	Peningkatan/Perbaikan Gedung Kantor dan Meubani Lainnya			0,00	0,00			10.000.000,00	3,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%										
			Renovasi Bangunan Kantor	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit			3,00%		3,00%		100,00%												
													Batas atas capaian kinerja													
													Profil Kinerja													
													78,22%		88,81%											
													70,00%		80,00%											

			PROGRAM PENINGKATAN KETERANGAN DAN KETERIBAN UMUM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.444.773,954,00		7.439.218,837,00	42,64%	4.206,577,861,00	24,11%	130,34%			
Peningkatan Genggam Keterbacaan dan Keterbacaan Umum dalam 1 (satu) Dewarah Kabupaten Kota																				
			1. Peningkatan Genggam Keterbacaan dan Keterbacaan Umum melalui Debitur, Dan dan Cegah Wabah Penyakit dan Penyelidikan/Pelaksanaan Penyelidikan/penyembuhan Penyakit			0,00	0,00				3.117.402,506,40	46,34%	2.285.247.279,00	41,24%	2.174.239.011,20	100,00%	100,10%			
			Kegiatan Pembiayaan yang dilakukan pengurusan			0	0				129	40,89%	43,70%	100,00%						
			Kegiatan Pembiayaan yang dilakukan pengurusan			0	0				129	40,89%	43,70%	100,00%						
		0 Okt	0 Okt			0 Okt	0 Okt	40,89%	40,89%	100,00%										
		0 Okt	0 Okt			0 Okt	0 Okt	40,89%	40,89%	100,00%										
			2. Perbaikan dan Genggam Keterbacaan dan Keterbacaan Umum Berbasis Petik dan Petik melalui Penyelidikan dan Penyelidikan Cegah-Rasi dan Keterbacaan Meas			0,00	0,00				118.739.272,10	49,09%	66.911.833,00	44,90%	75.044.270,40	63,99%	116,08%			
			Monev/Revisi Petik			0	0				74	42,21%	48,00%	94,54%						
			Monev/Revisi Petik			0	0				74	42,21%	48,00%	94,54%						
		0 Laporan Operasi	0 Laporan Operasi			0	0	42,21%	40,00%	90,00%										
		0 Laporan Operasi	0 Laporan Operasi			0	0	42,21%	40,00%	90,00%										
			3. Kualitas Penyelenggaraan Keterbacaan dan Keterbacaan Umum serta Perbaikan			0,00	0,00				11.610.000,00	37,37%	18.172.000,00	73,01%	20.025.000,00	125,17%	100,48%			
			Berthugas/Meas			0	0				1	8,27%	100,00%		174,23%					

			Operasional Publik Pemungutan Pajak Persewaan	0 Agustus	8 Agustus	12 Agustus	42,72%	42,72%	100,00%							
			Operasional Publik Pemungutan Pajak Persewaan	0 Agustus	8 Agustus	12 Agustus	42,72%	42,72%	100,00%							
			Pemungutan pajanggaan pada dan parkir	0 Agustus	8 Agustus	12 Agustus	42,72%	42,72%	100,00%							
			Pemungutan pajanggaan pada dan parkir	0 Agustus	8 Agustus	12 Agustus	42,72%	42,72%	100,00%							
Pengelolaan Kawasan Khusus		0 Agustus	0 Agustus	12 Agustus	42,72%	42,72%	100,00%									
Pengelolaan Kawasan Khusus		7 Agustus	0 Agustus	12 Agustus	42,72%	42,72%	100,00%									
Pengelolaan Kawasan Liris		7 Agustus	0 Agustus	12 Agustus	42,72%	42,72%	100,00%									
Pengelolaan Kawasan Liris		0 Agustus	0 Agustus	12 Agustus	42,72%	42,72%	100,00%									
Pengelolaan Kawasan Wisata		0 Agustus	0 Agustus	12 Agustus	42,72%	42,72%	100,00%									
Pengelolaan Kawasan Wisata		7 Agustus	0 Agustus	12 Agustus	42,72%	42,72%	100,00%									
			10. Pemeliharaan dan Peningkatan Perawatan Daerah-daerah Persewaan Binaan/Wali Kota			0,00	1,000	100,000,000,00	44,96%	151,182,424,000	44,96%	136,187,771,200	100,00%	100,00%		
			Expansif pemungutan pada yang dibayar secara bulanan	0 Agustus	8 Agustus	12 Agustus	44,96%	44,96%	100,00%							
			Expansif pemungutan pada yang dibayar secara bulanan	0 Agustus	8 Agustus	12 Agustus	44,96%	44,96%	100,00%							
Pengukuran bulanan terhadap sampah yang tidak secara rutin pengisian PPHS		0 Agustus	0 Agustus	12 Agustus	44,96%	44,96%	100,00%									
Pengukuran bulanan terhadap sampah yang tidak secara rutin pengisian PPHS		0 Agustus	0 Agustus	12 Agustus	44,96%	44,96%	100,00%									
			Perbaikan Fasilitas Pegawai Negeri Negeri (PNNK) Kabupaten Kota													
			11. Pengembangan Kapasitas dan Kerja PPHS			0,00	0,000	0,000,000,000,00	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,00%		
			Coaching kelas PPHS (20 orang)	0 Juli	0 Juli	1 Juli	0,00%	0,00%	0,00%							
Coaching kelas PPHS (20 orang)		0 Juli	0 Juli	1 Juli	0,00%	0,00%	0,00%									
			Pengukuran Fasilitas Daerah Kabupaten Kota dan Perawatan Binaan/Wali Kota													
			12. Inspeksi Pengawasan Perawatan Daerah-daerah Persewaan Binaan/Wali Kota			0,000	0,000	2,420,000,000,000,00	100,00%	2,420,000,000,000,000	100,00%	0,000	100,00%	0,00%		
			Tidak terpenuhi Inspeksi Pengawasan Perawatan Daerah dan Persewaan Binaan/Wali Kota	0 Agustus	8 Agustus	1 Agustus	100,00%	100,00%	100,00%							
Tidak terpenuhi Inspeksi Pengawasan Perawatan Daerah dan Persewaan Binaan/Wali Kota		0 Agustus	0 Agustus	1 Agustus	100,00%	100,00%	100,00%									
			Rata-rata capaian kinerja										80,97%	80,11%		
			Fasilitas Kinerja										78,99%	78,99%		
			Total anggaran dari seluruh program					10,241,379,890,000		8,826,721,299,000		4,826,781,787,400				
			Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 13)										81,17%	100,00%		

Pencapaian kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)		Tinggi	Sangat Tinggi								
Kolaborasi Keberhasilan Kinerja	Kolaborasi internal serta dengan, masyarakat dan evaluasi realisasi kegiatan serta dengan program serta hasil pendukung utama program sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan rencana utama Rencana CPD dapat segera diidentifikasi untuk segera diperbaiki/atas dan diatasi.										
Kolaborasi Keberhasilan Kinerja	Pelaksanaan kegiatan kekinian/kehidupan masyarakat yang diarahkan/pertemuan/berinteraksi dengan pihak ketiga, kegiatan internal, serta diarahkan kearah yang dapat menjadi pengabdian kepada Masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan yang dapat menjadi sumber-sumber tidak optimal untuk mendapat peningkatan/terasa positif pengabdian (ADSD)										
Tingkat yang dipertahankan/diambil ke depan	melaksanakan kegiatan secara optimal dengan koordinasi/terkoordinasi yang ada, sehingga tidak terjadi kendala baik kegiatan maupun baik hasil terdapat kekinian/kehidupan masyarakat (kegiatan tidak hanya sekedar kegiatan yang ada dan dilakukan tapi untuk menunjang optimalisasi/realisasi baik kegiatan dan kekinian/kehidupan masyarakat dengan pelaksanaan kegiatan										
Tingkat yang dipertahankan/diambil ke depan	Pelaksanaan perencanaan pada aspek kekinian/kehidupan masyarakat baik internal maupun eksternal, sehingga perencanaan baik internal dan eksternal dapat berjalan dengan optimal dan terarah kearah yang dapat menunjang optimalisasi/realisasi baik kegiatan dan kekinian/kehidupan masyarakat dengan pelaksanaan kegiatan										

Yogyakarta,

Ditandatangani oleh
Kepala BAPEDAS

Dr. AGUS WIDARJO
NIP. 012801308000004

2022

Yogyakarta,

Ditandatangani oleh
Kepala BAPEDAS

Agus Tri Riyanto, ST, MT
NIP. 0128004299800004

2022

		7. Koordinasi dan Pelaksanaan Manajemen HKPD		0,00	0,00	90.000,00	90,00%	90.000,00	90,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		8. Koordinasi dan Pelaksanaan Layanan Keuangan Akutik Tahun HKPD		0,00	0,00	60.000,00	90,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		Layanan Keuangan Akutik Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		9. Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Pelayanan Perumahan		0,00	0,00	47.000,00	92,00%	17.000,00	36,20%	0,00	100,00%	0,00%							
		Bidang Pelayanan Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		10. Penyelenggaraan Pelayanan Layanan Keuangan Bidang Tanah dan Perumahan HKPD		0,00	0,00	47.000,00	97,70%	200.000,00	42,70%	0,00	100,00%	0,00%							
		Layanan Keuangan Bidang Tanah dan Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		11. Pelayanan Pelayanan dan Kendala Pelayanan Masyarakat Anggaran		0,00	0,00	60.000,00	90,00%	40.000,00	66,67%	0,00	100,00%	0,00%							
		Layanan Pelayanan Masyarakat Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		100,00%									
Administrasi Umum Persekolah Dasar																			
		12. Penyelenggaraan Kegiatan Lokal Pengajaran Bahasa Kerja		0,00	0,00	4.145.000,00	40,20%	1.407.000,00	34,20%	2.738.000,00	100,00%	104,70%							
		Kegiatan Kegiatan Lokal Pengajaran Bahasa Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		13. Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Fasilitas		0,00	0,00	700.000,00	90,00%	49.071.120,00	62,70%	94.111.000,00	104,70%	147,10%							
		Aktivitas Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		Bantal Sajin	0,00	0,00	3,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		Charger Laptop	0,00	0,00	3,00	0,00%		100,00%		100,00%									
		Coal Pita	0,00	0,00	3,00	0,00%		100,00%		100,00%									
		Flektibel	0,00	0,00	10,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		Kabel USB	0,00	0,00	3,00	0,00%		100,00%		100,00%									
		Kertas	0,00	0,00	4,00	0,00%		100,00%		100,00%									
		Mesin	0,00	0,00	12,00	0,00%		100,00%		100,00%									
		Perbaikan Fasilitas Tangga	0,00	0,00	20,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		Roller meja	0,00	0,00	3,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		Tasor printer	0,00	0,00	4,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		USB format	0,00	0,00	3,00	0,00%		100,00%		100,00%									
		14. Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan		0,00	0,00	60.200.000,00	42,00%	35.827.000,00	59,50%	2.214.200,00	3,70%	14,80%							
		Perbaikan Fasilitas	0,00	0,00	12,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		Perbaikan Fasilitas Kendaraan	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		15. Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Fasilitas		0,00	0,00	2.000.000,00	40,00%	1.200.000,00	60,00%	1.400.000,00	70,00%	122,70%							
		Perbaikan Fasilitas	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		16. Penyelenggaraan Kegiatan Kendaraan dan Komunikasi HKPD		0,00	0,00	25.000.000,00	70,00%	90.000.000,00	70,00%	40.000.000,00	100,00%	142,90%							
		Mobil Dinas Rapat	0,00	0,00	1.400,00	0,00%		0,00%		64,00%		64,00%							
		Rapat Komunikasi dan Komunikasi Bidang (RKB)	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		Rapat Komunikasi dan Komunikasi Bidang (RKB)	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		100,00%									
		Rapat Komunikasi dan Komunikasi Bidang (RKB)	0,00	0,00	1,00	0,00%		0,00%		100,00%									
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan Dasar																			
		17. Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan		0,00	0,00	4.000.000,00	40,00%	2.700.000,00	67,50%	2.300.000,00	57,50%	113,60%							

			0 kwh	0 kwh	00 kwh	43,0%	38,8%	38,0%									
		Penggunaan tenaga listrik (jasa cat)	0 kwh	0 kwh	00 kwh	20,0%		23,8%		34,0%							
		Sewa Kulkas	0 kwh	0 kwh	00 kwh	40,0%		44,0%		76,0%							
	18	Penggunaan Jasa Penyediaan/Suplai Daya Air dan Listrik	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	45,9%	2.700.000,00	47,8%	1.370.172,00	46,8%						
		Penggunaan listrik untuk kegiatan	0 kwh	0 kwh	00 kwh		40,9%	45,8%		76,0%							
	19	Penggunaan Jasa Pelayanan Cuci dan Kering	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	49,9%	17.842.402,00	44,9%	184.544.100,00	100,0%	100,0%					
		Sewa Laundry Service	0 kwh	0 kwh	00 kwh		49,9%	44,9%		100,0%							
		Pendapatan Bersih Milik Daerah Pemegang Saham Pemerintah Daerah															
	20	Penggunaan Jasa Penyediaan/Suplai Penyediaan Air Pijah, Kebutuhan Pemangan Listrik dan Kebutuhan Other Airflow	0,00	0,00	0,00	44.500.000,00	30,7%	47.450.000,00	34,7%	34.250.200,00	32,1%	44,2%					
		Penggunaan Pajuk kendaraan/ kendaraan dan kendaraan dan jasa lain-roda 2	0 kwh	0 kwh	00 kwh		30,7%		44,9%	76,7%							
		Penggunaan Pajuk kendaraan/ kendaraan dan kendaraan dan jasa lain-roda 4	0 kwh	0 kwh	00 kwh		30,7%		54,9%	100,0%							
		Penggunaan pajak kendaraan/ kendaraan dan kendaraan dan jasa lain-roda 2	0 kwh	0 kwh	00 kwh		30,7%		46,8%	76,7%							
		Penggunaan pajak kendaraan/ kendaraan dan kendaraan dan jasa lain-roda 4	0 kwh	0 kwh	00 kwh		30,7%		44,9%	76,7%							
	21	Penggunaan Jasa Penyediaan/Suplai Penyediaan/Suplai dan Operasional dan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	106.210.000,00	32,0%	215.215.100,00	48,7%	228.000.000,00	52,0%	201,7%					
		Penggunaan Pajuk dan KIR kendaraan dan operasional/operasional roda 2	0 kwh	0 kwh	00 kwh		32,0%		48,8%	91,2%							
		Penggunaan Pajuk dan KIR kendaraan dan operasional/operasional roda 4	0 kwh	0 kwh	00 kwh		32,0%		48,8%	91,2%							
		Penggunaan Pajuk kendaraan dan operasional/operasional roda 2	0 kwh	0 kwh	00 kwh		32,0%		54,8%	100,0%							
		Penggunaan pajak kendaraan/ kendaraan dan operasional/operasional roda 2	0 kwh	0 kwh	00 kwh		32,0%		48,8%	91,2%							
		Penggunaan pajak kendaraan/ kendaraan dan operasional/operasional roda 4	0 kwh	0 kwh	00 kwh		32,0%		48,8%	91,2%							
		Penggunaan pajak kendaraan/ kendaraan dan operasional/operasional roda 4	0 kwh	0 kwh	00 kwh		32,0%		48,8%	100,0%							
	22	Penggunaan Penyediaan dan Masa Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	32,1%	9.075.000,00	31,5%	2.340.000,00	22,1%	26,3%					
		RAJ hasil	0 kwh	0 kwh	0 kwh		32,1%		32,1%	100,0%							
		RT	0 kwh	0 kwh	0 kwh		32,1%		6,8%	6,8%							

			Berat kawat besi 2, jumlah kawat besi 72 ditambahkan dengan jumlah kawat di kota 5,12 dikali 100% dengan berat kawat besi 20% ditambah jumlah kawat besi yg ditambahkan diteng (Lupa) pematikan kawat besi 100% dengan berat kawat besi 3%																
			Pembelian peralatan Kapasitas Pol PP	100,00 %	0,00	95,00 %	0,00	100,00 %	0,00	95,00 %	0,00	70,82 %	0,00	185,27 %	0,00 %				Kategori Pembelian dan Pengalokasian Kapasitas SDM
			Pembelian Peralatan Pelanggaran K3, keselamatan, dan kesehatan	95,00 %	0,00	95,00 %	0,00	100,00 %	0,00	95,00 %	0,00	100,00 %	0,00	185,00 %	0,00 %				SATGAS PP
Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Kelembagaan Unit dalam Uraian Daerah Kabupaten Kota																			
			1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Kelembagaan Unit melalui Dinkas dan Capaian Uraian Pelaksanaan Peningkatan Kelembagaan dan Kelembagaan		0,00		0,00		5.117.402.000,00	41,34 %	2.205.307.270,00	43,34 %	2.134.238.911,00	100,00 %	100,00 %				
			Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Kelembagaan	Penganggaran		Penganggaran		Penganggaran		45,00 %		44,99 %	100,00 %						
			Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Kelembagaan	Penganggaran		Penganggaran		Penganggaran		45,34 %		44,99 %	100,00 %						

Plan Submisi dan Vegetasi (20 orang)	0 kat	0 kat	0 kat	5 (0%)	5 (0%)	100 (0%)										
		3. Peningkatan Kualitas (KMM) Jurnal Praktek Farmakognosi dan Jurnal Farmakologi Masyarakat termasuk Jurnal Farmakognosi juga yang Bermain (Jkr, Kari, Minat)		0 (0)	0 (0)	246.921,132 (0)	41,28%	90.990,296 (0)	22,64%	32.178.349,22	32,48%	73,17%				
			Jurnal Kari	0 kat	0 kat	13 kat	41,28%		33,33%		30,14%					
			Jurnal Kari	0 kat	0 kat	13 kat	41,28%		33,33%		30,14%					
			Karyawisata Pr (P) dan Lintasi (L) yang pel pp dan M untuk (Rara)	0 kat	0 kat	13 kat	41,28%		41,28%		100,00%					
			Karyawisata Pr (P) dan Lintasi (L) yang pel pp dan M untuk (Rara)	0 kat	0 kat	13 kat	41,28%		41,28%		100,00%					
			Perkuliahan Lintasi	0 kat	0 kat	2 kat	41,28%		41,28%		100,00%					
			Perkuliahan Lintasi	0 kat	0 kat	2 kat	41,28%		41,28%		100,00%					
Perkuliahan pendukung yang dipusatkan (khusus/bank)	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	41,28%		10,00%		30,79%					
Perkuliahan pendukung yang dipusatkan (khusus/bank)	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	41,28%		10,00%		30,79%					
Tes Kemampuan (0 orang)	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	41,28%		0,00%		0,00%					
Tes Kemampuan (0 orang)	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	41,28%		0,00%		0,00%					
Workshop (0 orang Fasilitas Nepal Dulu) Farmakognosi (130 orang)	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	41,28%		0,00%		0,00%					
Workshop (0 orang Fasilitas Nepal Dulu Farmakognosi (130 orang)	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	41,28%		0,00%		0,00%					
		6. Kegiatan yang Ledang dan Kegiatan dalam bentuk Peningkatan dan Peningkatan Sistem Kesehatan dan Kerjasama Usaha		0 (0)	0 (0)	1.213.661.060 (0)	82,30%	826.773.640 (0)	43,30%	4.033.136 (0)	100,00%	128,32%				
			Oralisan Pengembangan Gastrin Pasa / Suka	0 kat	0 kat	12 kat	82,30%		45,30%		100,00%					
			Oralisan Pengembangan Gastrin Pasa / Suka	0 kat	0 kat	12 kat	82,30%		45,30%		100,00%					
			Perawatan Gastrin Keping Pasa Suka	0 Keping	0 Keping	11 Keping	20,00%		29,80%		100,00%					
			Perawatan Gastrin Keping Pasa Suka	0 Keping	0 Keping	11 Keping	20,00%		29,80%		100,00%					
			Perawatan Gastrin Pasa di School	0 School	0 School	4 School	11,00%		71,20%		100,00%					
Perawatan Ganda Pasa di School	0 School	0 School	0 School	0 School	0 School	0 School	11,00%		11,00%		100,00%					
Perawatan Pasa di School	0 School	0 School	0 School	0 School	0 School	0 School	11,00%		11,00%		100,00%					
Perawatan Suka di Kampus	0 Dekan	0 Dekan	0 Dekan	0 Dekan	0 Dekan	0 Dekan	11,00%		11,00%		100,00%					
Perawatan Suka di Kampus	0 Dekan	0 Dekan	0 Dekan	0 Dekan	0 Dekan	0 Dekan	11,00%		11,00%		100,00%					
		7. Kegiatan dan Tertentu dalam dan Peningkatan Kerjasama dan Kerjasama Usaha		0 (0)	0 (0)	40.000 (0)	100,00%	40.000 (0)	100,00%	40.000 (0)	100,00%	100,00%				
			Pengadaan Obat dalam Upacara Kerjasama Kerjasama	0 kat	0 kat	0 kat	100,00%		100,00%		100,00%					
Pengadaan Obat (200)	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	0 kat	100,00%		100,00%		100,00%					

Lampiran Laporan Kinerja Keuangan																	
			9. Penyelenggaraan dalam rangka kegiatan, kegiatan, kegiatan, dan kegiatan		0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%				
			Kegiatan yang dilaksanakan yang berkaitan dengan kegiatan, kegiatan, kegiatan, dan kegiatan (SPD)	0 Tahun	0 Tahun	1 Tahun		0,00%	0,00%	0,00%							
Kegiatan yang dilaksanakan yang berkaitan dengan kegiatan, kegiatan, kegiatan, dan kegiatan (SPD)		0 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	0,00%	0,00%		0,00%									
Pengeluaran Penerimaan Daerah Kabupaten Kota dan Pemerintah Daerah/Wali Kota																	
			10. Pengeluaran dan Kegiatan Penyelenggaraan, Penyelenggaraan, Penyelenggaraan, dan Penyelenggaraan		0,00	0,00	2.455.575.440,00	42,72%	1.342.771.440,00	42,72%	1.442.944.200,00	100,00%	100,00%				
			Operasi dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan	0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun		42,72%	42,72%	42,72%	100,00%						
			Operasi dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan	0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun		42,72%	42,72%	42,72%	100,00%						
			Operasi dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan	0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun		42,72%	42,72%	42,72%	100,00%						
			Operasi dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan	0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun		42,72%	42,72%	42,72%	100,00%						
			Pengeluaran dan Kegiatan Penyelenggaraan	0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun		42,72%	42,72%	42,72%	100,00%						
			Pengeluaran dan Kegiatan Penyelenggaraan	0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun		42,72%	42,72%	42,72%	100,00%						
Pengeluaran dan Kegiatan Penyelenggaraan		0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun	42,72%	42,72%		100,00%									
Pengeluaran dan Kegiatan Penyelenggaraan		0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun	42,72%	42,72%		100,00%									
Pengeluaran dan Kegiatan Penyelenggaraan		0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun	42,72%	42,72%		100,00%									
Pengeluaran dan Kegiatan Penyelenggaraan		0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun	42,72%	42,72%		100,00%									
Pengeluaran dan Kegiatan Penyelenggaraan		0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun	42,72%	42,72%		100,00%									
			10. Pengeluaran dan Kegiatan Penyelenggaraan, Penyelenggaraan, Penyelenggaraan, dan Penyelenggaraan		0,00	0,00	200.000.000,00	44,94%	171.102.000,00	44,94%	138.907.270,00	100,00%	100,00%				
			Layanan penyelenggaraan yang berkaitan dengan penyelenggaraan	0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun		44,94%	44,94%	44,94%	100,00%						
			Layanan penyelenggaraan yang berkaitan dengan penyelenggaraan	0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun		44,94%	44,94%	44,94%	100,00%						
Pengeluaran dan Kegiatan Penyelenggaraan		0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun	44,94%	44,94%		100,00%									
Pengeluaran dan Kegiatan Penyelenggaraan		0 Tahun	0 Tahun	12 Tahun	44,94%	44,94%		100,00%									
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota dan Pemerintah Daerah/Wali Kota																	
			10. Pengeluaran dan Kegiatan Penyelenggaraan, Penyelenggaraan, Penyelenggaraan, dan Penyelenggaraan		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%				
			Cadangan dana APBD (DPA)	0 Tahun	0 Tahun	1 Tahun		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
Cadangan dana APBD (DPA)		0 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	0,00%	0,00%		0,00%									
Pengeluaran Penerimaan Daerah Kabupaten Kota dan Pemerintah Daerah/Wali Kota																	

D. Sertifikasi Perangkat Lunakan Baru dan Perbaikan Sistem/Modul Baru					000	000	2.000.000,00	000,00%	1.025.000,00	000,00%	0,00	000,00%	0,00%							
Informasi Sertifikasi Perbaikan Perangkat Lunakan Baru dan Perbaikan Sistem/Modul Baru				0 Sertifikasi		0 Sertifikasi		000,00%		000,00%		000,00%								
Terlaksananya Sertifikasi Perbaikan Perangkat Lunakan Baru dan Perbaikan Sistem/Modul Baru		0 Sertifikasi		0 Sertifikasi		0 Sertifikasi		000,00%		000,00%										
Batas-batas capaian kinerja																				
Profilan Kinerja																				
Total anggaran dan seluruh program																				
Total Batas-batas capaian kinerja dan anggaran dan seluruh program (Program 1 + 2) (1)																				
Profilan kinerja dan seluruh program (program 1 + 2, program 2)																				
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja	Kondisi awal yang sangat penting, yaitu tentang data rekam jejak kinerja serta anggaran anggaran yang telah disediakan, semua program sehingga apabila ada permasalahan yang berwujud kontradiksi pelaksanaan capaian kinerja (KPI) dapat segera diidentifikasi untuk diteliti, sehingga dapat segera diteliti dan diteliti.																			
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	Perencanaan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja, serta dukungan sumber daya yang memadai yang dapat meningkatkan kinerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja.																			
Tingkat hasil yang diperoleh dalam triwulan ke-1	- Pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terencana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja, serta dukungan sumber daya yang memadai yang dapat meningkatkan kinerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja.																			
Tingkat hasil yang diperoleh dalam tahun ke-1	Pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terencana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja, serta dukungan sumber daya yang memadai yang dapat meningkatkan kinerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja.																			

Sekretaris

Disusun oleh
Kajati SATPOL PP

2022

Sekretaris

Disusun oleh
Kajati KANP212A

2022

Dr. AGUS WISARDI
NIP. 197003101990001004

Agus Tri Hartono, ST, MT
NIP. 19700601196001004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepemdagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Dan dinamisasi kebijakan pelaksanaan kegiatan dan juga berdasarkan hasil reuiu, monitoring dan evaluasi, terdapat penambahan sub kegiatan baru pada perencanaan kerja perubahan tahun 2022 yakni Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sebagai tindak lanjut pelaksanaan Surat Edaran Kemendagri tentang Hasil Inventansasi dan Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes Kepmendagri. Adapun Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Satpol PP pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan kegiatan :

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - 2) Perindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - 3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 5) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia
 - 6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 7) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 8) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Pengurangan dan penambahan anggaran pada sub kegiatan perubahan renja 2022 beserta keterangannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 (RENJA PERUBAHAN 2022)
Kota Yogyakarta - SIPO PENETAPAN**

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
NAMA OPD : SATUAN POLISI RAMBONG-PAJAJA

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Page Mula	Page Perubahan (sesuai desk)	Selisih Bertambah/Berkurang	Keterangan
		Kategori Sub Kegiatan		Target					
		Mula	Perubahan	Mula	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8-7)	10
1.05.01	PROGRAM PENGUJIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.125.041.785	18.709.992.731	675.950.946	
1.05.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35.549.132	32.009.132	(3.538.000)	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Kelemb. Keroba	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Kelemb. Keroba	3 dokumen	3 dokumen	2.050.000	809.900	(1.240.000)	Efektifitas koordinasi, efisiensi anggaran makan minum rapat
		Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan kegiatan Perangkat Daerah	Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				
1.05.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	RKA dan RKA OPD, DPA dan DPPA OPD	RKA dan RKA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	4 dokumen	1.000.000	523.000	(377.000)	Efektifitas koordinasi, efisiensi anggaran makan minum rapat
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	3 dokumen	32.479.132	29.857.132	(2.622.000)	Efektifitas koordinasi, efisiensi anggaran makan minum rapat
		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	6 dokumen				
		Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 dokumen	2 dokumen				
		Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen				
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	1.000.000	523.000	(377.000)	Efektifitas koordinasi, efisiensi anggaran makan minum rapat
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.929.540.000	16.993.971.296	30.631.296	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	174 ASN	174 ASN	16.932.079.000	16.949.124.296	20.545.296	Penyesuaian perhitungan gaji dan TPF dan Bulang Pembendaharaan SPKAD (bertambah volume 2 bulan gaji, Pengurangan anggaran TPF)
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	2 dokumen	90.000	90.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan verifikasi	Bahan Pelaksanaan verifikasi	3 dokumen	3 dokumen	90.000	90.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5 dokumen	5 dokumen	90.000	90.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.01.2.02.05	Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	80.000	80.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	2 dokumen	417.000	300.000	(117.000)	Efektifitas koordinasi, efisiensi anggaran makan minum rapat
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	12 dokumen	417.000	417.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	80.000	80.000	0	Tidak terdapat perubahan

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Mula	Pagu Perubahan (Setelah desk)	Selisih Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Keluaran Sub Kegiatan		Target					
		Mula	Perubahan	Mula	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8-7)	10
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					398.458.853	757.684.909	359.226.056	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	4.281.000	22.231.000	17.950.000	Penambahan daya listrik (1000 watt x Rp. 1.700.00)
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor		Alat Tulis Kantor	58 jenis	73.013.453	492.554.909	419.541.456	Penambahan anggaran belanja sarpras pembukung ketugasan Satpol PP sejumlah 13 jenis
		Peralatan Rumah Tangga		Peralatan Rumah Tangga	20 jenis				
		Refil tinta		Refil tinta	3 jenis				
		Mopla		Mopla	12 buah				
		Flashdisk		Flashdisk	20 buah				
		Kabel USB		Kabel USB	3 buah				
		USB Terminal		USB Terminal	3 buah				
		Toner printer		Toner printer	4 jenis				
		Keyboard		Keyboard	4 buah				
		Mouse laptop		Mouse laptop	3 buah				
		Charger laptop		Charger laptop	3 buah				
		Cool Pad		Cool Pad	3 buah				
				Kipas angin (exhaust fan)					
				Kipas angin cas outdoor					
				AC					
				Komputer/PC					
				Laptop					
				Printer Warna					
				Meja 1/2 besi					
				Buku Kelta Ruler					
				Sepatu Dinas Lapangan					
				Sepatu Dinas Mahan					
				Sofa					
				Thermometer					
				Perengkapan CCTV					
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		Barang cetakan	12 jenis	89.283.000	89.283.000	0	Tidak terdapat perubahan
		Fenggandaan surat-surat/dokumen		Fenggandaan surat-surat/dokumen	50000 lembar				
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Surat kabar selama 12 bulan		Surat kabar selama 12 bulan	2 jenis	2.540.000	3.880.000	1.340.000	Penambahan menyesuaikan harga ml
1.05.01.2.06.01	Pembiayaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPO	Makan Minum Rapat		Makan Minum Rapat	1440 Or	79.360.000	154.560.000	85.200.000	Penambahan volume pagelaran dinas ke luar daerah (Konsultasi ke luar daerah dalam jasa = 3 org x 3 hari x 8 kali x 1.700.000)
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (Dn)		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (Dn)	4 kali				
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah (Luar)		Rapat Koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Luar)	3 kali				
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar area		Rapat Koordinasi dan konsultasi luar area	1 kali				

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Mula	Pagu Perubahan (Setelah desk)	Selisih Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Keluaran Sub Kegiatan		Target					
		Mula	Perubahan	Mula	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8-7)	10
1.05.01.2.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Urusan Pemerintahan Daerah					210.568.000	210.568.000	0	
1.05.01.2.05.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Surat keluar	Surat keluar	30 surat	30 surat	6.000.000	6.000.000	0	Tidak terdapat perubahan
		Fenggal/ biaya material pada tali mata	Fenggal/ biaya material pada tali mata	20 buku	20 buku				
				100 lembar	100 lembar				
1.05.01.2.05.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Fasilitasan rekening telepon	Fasilitasan rekening telepon	12 bulan	12 bulan	5.400.000	5.400.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.01.2.05.04	Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor	Jasa Cleaning Service	Jasa Cleaning Service	12 bulan	12 bulan	198.968.000	198.968.000	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Bangun MWK Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah					711.130.000	849.560.000	138.430.000	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	17 unit	17 unit	64.300.000	64.300.000	0	Tidak terdapat perubahan
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	1 unit	1 unit				
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	17 unit	17 unit				
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	1 unit	1 unit				
1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	27 unit	27 unit	399.230.000	399.320.000	(5.000.000)	- Penambahan anggaran pemeliharaan kendaraan roda dua operasional (3 unit)
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	28 unit	28 unit				- Penambahan biaya perawatan pajak (ETVK)
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 5	3 unit	3 unit				- Penyediaan harga satuan pertama; Pengurangan anggaran 65% kendaraan operasional BKD kabupaten
		Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	27 unit	27 unit				
		Pembayaran Pajak dan HT kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	Pembayaran Pajak dan HT kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	28 unit	28 unit				
		Pembayaran Pajak dan HT kendaraan dinas operasional/lapangan roda 5	Pembayaran Pajak dan HT kendaraan dinas operasional/lapangan roda 5	3 unit	3 unit				
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Computer	Computer	3 unit	3 unit	17.400.000	17.400.000	0	Tidak terdapat perubahan
		Laptop	Laptop	2 unit	2 unit				
		Printer	Printer	10 unit	10 unit				
		Kamera	Kamera	3 unit	3 unit				
		AC Split	AC Split	3 unit	3 unit				
		Meja tulis	Meja tulis	3 unit	3 unit				
		HT	HT	3 unit	3 unit				
		Peralatan multimedia	Peralatan multimedia	1 unit	1 unit				
		Pompa air	Pompa air	2 unit	2 unit				
1.05.01.2.09.08	Pemeliharaan/Yakabiltas) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banwal/ bangunan kantor	Banwal/ bangunan kantor	1 unit	4 ruang	10.000.000	149.740.000	149.740.000	Mebel Kantor Ruang Kantor, Kamar Mandi dan Interior Ruang Kantor, Partisi ruang aset (Rak Kerja), dan Stulang/ta Pol PP

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Mula	Pagu Perubahan (Desudut desk)	Selisih Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Keluaran Sub Kegiatan		Target					
		Mulai	Perubahan	Mulai	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8-7)	10
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					17.044.773.804	18.007.790.969	1.062.917.559	
1.05.02.2.01	Pengamanan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 2 (dua) Daerah Kabupaten/Kota					8.291.619.492	9.316.432.851	1.024.813.359	
1.05.02.2.01.01	Pengamanan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kegiatan Pemkot yang dilakukan pengamanan Tempat pending milk Pemkot yang dilakukan pengamanan (Komplek Balai Kota, Rumah Dinas, Shelter COVID-19, Rumah Dinas Jh. Sate Tui Harsono, Gedung Sita, Pabrik Vertikal, CCTV)	Kegiatan Pemkot yang dilakukan pengamanan Tempat pending milk Pemkot yang dilakukan pengamanan (Komplek Balai Kota, Rumah Dinas, Shelter COVID-19, Rumah Dinas Jh. Sate Tui Harsono, Gedung Sita, Pabrik Vertikal, CCTV)	120 pengamatan	140 pengamatan	9.117.602.896	9.742.452.996	624.849.000	- Penambahan volume kegiatan pengamatan umum (honor honor PMS, makan minum personal, sewa sarpras) dan kegiatan operasional Satgas Anti Ribut (honor honor PMS dan makan minum ops) sejumlah Rp138.875.000,00 - Penambahan volume kegiatan pengamatan shelter covid sejumlah Rp246.475.000,00 - Penambahan petugas pengamatan oleh pihak ketiga yakni Pengamanan Rumah Dinas Walikota, Gedung Sita Pol PP, Pabrik Vertikal, dan Pengamanan Tertutup CCTV sejumlah Rp341.500.000,00
1.05.02.2.01.02	Pemindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	Monitoring dan penertiban gangguan ketertarikan dan ketertiban umum Monitoring Ems Pelajar	Monitoring dan penertiban gangguan ketertarikan dan ketertiban umum Monitoring Ems Pelajar	36 laporan operasi	36 laporan operasi	158.530.272	158.530.272	0	Tidak terdapat perubahan
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan SDM Kajian pelaksanaan Peraturan Daerah Bimbingan teknis petugas tindak internal Pasume dan kodifikasi produk hukum daerah	Pembinaan SDM Kajian pelaksanaan Peraturan Daerah Bimbingan teknis petugas tindak internal Pasume dan kodifikasi produk hukum daerah	10 dokumen 7 dokumen 1 kali 4 Peraturan Perizinan	10 dokumen 7 dokumen 1 kali 4 Peraturan Perizinan	31.810.000	45.505.000	13.695.000	Penambahan volume kegiatan kajian pelaksanaan peraturan daerah (makan minum dan sarpras) 700 kajian permasalahan hukum) dan (jurnal makan minum) bina, pembinaan SDM
1.05.02.2.01.04	Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Piket Satlinmas Kota Yogyakarta (20 orang 3 shift) Mobilisasi petugas linmas Mobilisasi Petugas linmas dalam penanganan musibah dan bencana (20 orang) Pembuatan Kartu Tanda Anggota Linmas	Piket Satlinmas Kota Yogyakarta (20 orang 3 shift) Mobilisasi petugas linmas Mobilisasi Petugas linmas dalam penanganan musibah dan bencana (20 orang) Pembuatan Kartu Tanda Anggota Linmas	304 hari 54 kali 3 bulan 884 buah	365 hari 59 kali 3 bulan 1000 buah	1.532.269.395	1.372.569.396	160.300.000	- Penambahan volume waktu yang diikat petugas linmas dari 10 bulan menjadi 11 bulan sejumlah Rp229.800.000,00 - Penambahan volume kegiatan mobilisasi linmas (honor dan makan minum operasional) sejumlah Rp50.000.000,00 - Penambahan volume pembuatan KTA linmas (884 buah) sejumlah Rp1.700.000,00 - Pengadaan anggran DBH CHT hasil pemetaan dan pemutakhiran 52 Mendagri (galer ke sub Vag Pengawasan atas Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota sejumlah Rp15.000.000,00)

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Mula	Pagu Perubahan (Desudut desk)	Selisih Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Keluaran Sub Kegiatan		Target					
		Mula	Perubahan	Mula	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8-7)	10
1.05.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDN Setpol Poldo Pamongrejo dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk Jalan Pelaksanaan Tugas yang Berhingga Hak Asasi Manusia	Kesempitan Pol PP dan Umma (60 orang polisi dan 50 orang Umma) Tes kesempatan (80 orang) Pembekalan Umma Peraturan perundang-undangan yang dipahamkan/dyacepatkan Imgan forak Workshop jabatan fungsional Setpol Poldo Pamongrejo (100 orang)	Kesempatan Pol PP dan Umma (60 orang polisi dan 50 orang Umma) Tes kesempatan (80 orang) Pembekalan Umma Peraturan perundang-undangan yang dipahamkan/dyacepatkan Imgan forak Workshop jabatan fungsional Setpol Poldo Pamongrejo (100 orang)	11 kali 3 kali 2 kali 3 peraturan perundang-undangan 15 kali 1 kali	11 kali 3 kali 3 kali 7 peraturan perundang-undangan 5 kali 1 kali	245.441.152	-211.221.152	(37.220.000)	Pengurangan volume kegiatan imgan forak karena realisasi mengakibatkan kelebihan pembatasan kegiatan perencanaan/operasi di tingkat Perkot tk (honor petugas dan makan minum) sejumlah Rp34.800.000,00 - Pengurangan anggaran DSH CHT hasil pemetaan dan penututiran SE Mendagri (gaji ke sub keg baru, sosialisasi) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sejumlah Rp2.420.000,00
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar lembaga dan mitra dalam Teknik Pengabdian dan Peningkatan Bangunan, Kelembagaan dan Keterbacaan Umum	Pencanangan Gerakan Kampung Pahlawan Tertib Pencanangan Gerakan Pahlawan for School Evaluasi implementasi Gerakan Pahlawan Tertib Perumbuhan Pahlawan for School Penyusunan Naskah Kerjasama	Pencanangan Gerakan Kampung Pahlawan Tertib Pencanangan Gerakan Pahlawan for School Evaluasi implementasi Gerakan Pahlawan Tertib Perumbuhan Pahlawan for School Penyusunan Naskah Kerjasama	31 kampung 4 sekolah 12 laporan 8 sekolah 5 dokumen	31 kampung 4 sekolah 12 laporan 8 sekolah 5 dokumen	1.213.663.995	-1.211.414.285	(2.249.710)	Pengurangan volume 3 bulan anggaran honorarium beserta SPK Tenaga Teknis Duta Kabupaten
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan dan Keterbacaan Umum	Pengadaan Pakarim Dinas Lapangan Umma beserta kelengkapannya Pengadaan Sepatu Dinas Lapangan Umma Pengadaan sarana dan prasarana pendukung ketetapan lapangan petugas Umma	Pengadaan Pakarim Dinas Lapangan Umma beserta kelengkapannya Pengadaan Sepatu Dinas Lapangan Umma Pengadaan sarana dan prasarana pendukung ketetapan lapangan petugas Umma	30 stel 200 pasang 5 jenis	315 stel 200 pasang 5 jenis	40.800.000	551.742.120	250.942.120	- Penambahan volume pengadaan PDK Umma beserta kelengkapannya (425 stel) sejumlah Rp331.250.000,00 - Penambahan pengadaan sepatu lapangan Umma (100 pasang) sejumlah Rp62.400.000,00 - Penambahan pengadaan sarung pendukung ketetapan penanggulangan musuh dan kencana sepatu boot tahan air, kacamata pelindung berenda anti-mel, sarung, chamois, bantal sejumlah Rp43.000.000,00
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Pengabdian Peraturan Daerah dan Perkada	Kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak penegakan perda Kota W (57%)	Kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak penegakan perda Kota W (57%)	1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	150.000.000	50.000.000	(100.000.000)	Pengurangan anggaran ganti kerugian kepada WNI yang terkena dampak akibat penegakan perda dan perkada (i.e. Taw) tidak terdapat realisasi anggaran kegiatan
1.05.02.2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota					8.766.174.912	8.766.337.512	161.663.000	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Tertindakannya sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		1 laporan	0	2.500.000	2.400.000	Sub Kegiatan baru: Penambahan anggaran DSH CHT hasil pemetaan dan penututiran SE Mendagri (penghasilan dari sub keg Peningkatan Kapasitas SDN Setpol Poldo Pamongrejo dan Satuan Perlindungan Masyarakat)

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Mula	Pagu Perubahan (Desudat desk)	Selisih Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Kawasan Sub Kegiatan		Target					
		Mula	Perubahan	Mula	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7-1)	10
1.05.00.2.02.00	Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Operasi Non Yustisi Pelanggaran Perda	Operasi Non Yustisi Pelanggaran Perda	12 laporan	12 laporan	8.465.373.484	8.437.166.864	(28.206.620)	- Terdapat sisa anggaran tentang pengabdian jasa tenaga pengendalian Kawasan Tertib kel. (komuter, Abu), Kawasan Tertib, dan Kawasan Wisata sejumlah Rp.428.880.000,00. - Penambahan volume interistas kegiatan dan personel (honor petugas operasional lapangan penegakan perda beserta makan minum pendukung operasional) - Penambahan anggaran pengadaan supra pendukung kegiatan penegakan perda - Pengalangan anggaran DSH DHT hasil pemetaan dan pemutakhiran 12 Mendagri (petel ke sub keg Pengawasan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota sejumlah Rp3.400.000.000)
		Peranginan pelanggaran perda dan perda	Peranginan pelanggaran perda dan perda	12 laporan	12 laporan				
		Operasional Polisi Pemong Praja Partisipasi	Operasional Polisi Pemong Praja Partisipasi	12 laporan	12 laporan				
		Pengendalian Kawasan Khusus	Pengendalian Kawasan Khusus	12 laporan	12 laporan				
		Pengendalian Kawasan Tertib	Pengendalian Kawasan Tertib	12 laporan	12 laporan				
		Pengendalian Kawasan Wisata	Pengendalian Kawasan Wisata	12 laporan	12 laporan				
			Sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda		12 jenis				
1.05.00.2.02.01	Pelanggaran atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan pelanggaran perda yang ditindak secara yustisi	Laporan pelanggaran perda yang ditindak secara yustisi	12 laporan	12 laporan	280.900.848	324.850.848	43.950.000	- Penambahan volume 2 bulan pada Honor Tim Kelengkapan Optimalisasi Penegakan Perda (Forkompinda) - Penambahan anggaran DSH DHT hasil pemetaan dan pemutakhiran 12 Mendagri (pengalangan dan sub keg Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dan sub keg Pembudayaan Perilaku Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertarikan Umum sejumlah Rp34.400.000.00)
		Pengalangan hukum terhadap bersangka yang tidak mematuhi panggilan PPHD	Pengalangan hukum terhadap bersangka yang tidak mematuhi panggilan PPHD	12 pelanggaran	12 pelanggaran				
			Tertindakannya Pelanggaran atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Subemur Seluas (DPR DHT)		10 laporan				

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Mula	Pagu Perubahan (Setelah desk)	Selisih Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Keluaran Sub Kegiatan		Target					
		Mula	Perubahan	Mula	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8-7)	10
1.05.02.2.05	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Mata					6.380.000	6.380.000	0	
1.05.02.2.05.01	Pengembangan kapasitas dan keterampilan	Coaching kelas PPNS (20 orang)	Coaching kelas PPNS (20 orang)	1 kali	1 kali	6.380.000	6.380.000	0	Tidak terdapat perubahan
TOTAL						35.170.819.589	35.827.743.054	1.726.927.505	

Sampai dengan TW II 2022 rencana kerja dan anggaran perubahan tahun ini, Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan. Hanya saja berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan revaluasi capaian kinerja sampai dengan 2021, terdapat revisi target capaian tujuan, target sasaran dan target program kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 adalah : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan target tujuan 97,65%.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan pengertian dimaksud maka sasaran Tahun 2022 yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, adalah Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat, dengan target sasaran 97,65%.

Anggaran Belanja Daerah Murni Tahun 2022 sejumlah Rp35.170.815.589,00. Total kebutuhan pagu indikatif Belanja Daerah untuk seluruh Program Dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp36.897.743.094,00 (Tiga puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh puluh empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga terdapat kenaikan pagu sejumlah Rp 1.726.927.505,00 terhadap anggaran murni 2022, dengan rincian kegiatan dapat dilihat dalam tabel Rencana Kerja Perubahan Satpol PP sebagaimana terlampir dalam Tabel 3.1.

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.25.0.00.2.02.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.25.0.00.2.02.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Uraian/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Salinan Kinerja				Rencana Tahun 2022								Mulaian Mula Rencana Tahun 2023					
		Catatan Program	Salinan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Uraian Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Jumlah Daya	Catatan Fasilitas	Target Capaian Kinerja		Alokasi Dana/ Paga Indikatif (Rp.)			
						Program		Kegiatan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sesuai	Tidak Sesuai				
						Seluruh	Sesuai	Seluruh	Sesuai	Seluruh	Sesuai						Seluruh	Sesuai	
1		URAIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKAYANG DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.05		URAIAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTAMAN UNUM BERTU PELINDUNGAN MASYARAKAT														25,170,512,188	24,807,743,284		49,244,451,832
1.05.01		PROGRAM PENJALANG URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN														18,126,941,745	18,798,961,731		33,648,203,832
1.05.01.2.0		Pelayanan, Pengawasan, dan Bantuan Kinerja Perangkat Daerah														28,346,137	32,088,137		40,342,000
1.05.01.2.0.1	2.0	Pelayanan, Pengawasan, dan Bantuan Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Pelayanan SAPD oleh Masyarakat	Dibangun Renc. Tahun 2022, Renc. Pembangunan Tahun 2022 dan Rencana lainnya	Dibangun dan Capaian Jangka Panjang (Kinerja Perangkat Daerah)	Indikator: Jumlah Masyarakat Terlayani	4.000+ (+40%)	4.000+ (+40%)	4.000+ (+40%)	4.000+ (+40%)	100%	100%	2.000.000	800.000	FUNDASI ASU (DAERAH PAD)	Hasil Pelayanan SAPD oleh Masyarakat	4.000+ (+40%)	4.000.000	
1.05.01.2.0.1	2.0	Kendala dan Respon dari Masyarakat Desa (KMD)	Hasil Pelayanan SAPD oleh Masyarakat	Hasil dan Renc. CPT, DPA dan lainnya (KMD)	Dibangun dan Capaian Jangka Panjang (Kinerja Perangkat Daerah)	Indikator: Jumlah Masyarakat Terlayani	4.000+ (+40%)	4.000+ (+40%)	4.000+ (+40%)	100%	100%	1.000.000	600.000	FUNDASI ASU (DAERAH PAD)	Hasil Pelayanan SAPD oleh Masyarakat	4.000+ (+40%)	1.000.000		
1.05.01.2.0.1	2.0	Kendala dan Respon dari Masyarakat Desa (KMD)	Hasil Pelayanan SAPD oleh Masyarakat	Dibangun dan Capaian Jangka Panjang (Kinerja Perangkat Daerah)	Dibangun dan Capaian Jangka Panjang (Kinerja Perangkat Daerah)	Indikator: Jumlah Masyarakat Terlayani	4.000+ (+40%)	4.000+ (+40%)	4.000+ (+40%)	100%	100%	2.000.000	800.000	FUNDASI ASU (DAERAH PAD)	Hasil Pelayanan SAPD oleh Masyarakat	4.000+ (+40%)	2.000.000		
1.05.01.2.0.1	2.0	Bantuan Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Pelayanan SAPD oleh Masyarakat	Dibangun dan Capaian Jangka Panjang (Kinerja Perangkat Daerah)	Dibangun dan Capaian Jangka Panjang (Kinerja Perangkat Daerah)	Indikator: Jumlah Masyarakat Terlayani	4.000+ (+40%)	4.000+ (+40%)	4.000+ (+40%)	100%	100%	1.000.000	600.000	FUNDASI ASU (DAERAH PAD)	Hasil Pelayanan SAPD oleh Masyarakat	4.000+ (+40%)	1.000.000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.01.01.01.000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.02.01.000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Uraian/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Cofinansi Partisipasi	Prestasi Mula Rencana Tahun 2023		
			Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Jumlah Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kelemban Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Page Indirect (Rp 1)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kelemban Dana/ Page Indirect (Rp 1)		
						Program	Kelemban Sub Kegiatan	Kelemban Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sekolah	Non Sekolah	Sekolah	Non Sekolah		Total Mula			Target	
			Sekolah	Non Sekolah	Sekolah	Non Sekolah	Sekolah	Non Sekolah	Sekolah	Non Sekolah	Sekolah	Non Sekolah	Total Mula	Target					
1.05.01.02.01	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan	Hasil Pembiayaan Lain-lain (Sampul)	Bantuan untuk kegiatan	Dukung ketercapaian aktivitas kerja masyarakat	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Desa, Kelurahan	A. 0104 - 02 1.4.00	A. 0104 - 02 1.4.03	12 juta (80000000000) rupiah	12 juta (80000000000) rupiah	100%	100%	0,000,000	0,000,000	PENDAPDAH AS.3 CA08AH (PAD)	Hasil Pembiayaan Lain-lain (Sampul)	A. 0104 - 02 1.4.03	100000000		
1.05.01.02.01	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan	Hasil Pembiayaan Lain-lain (Sampul)	Suara Kader (Grafis)	Dukung ketercapaian aktivitas kerja masyarakat	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Desa, Kelurahan	A. 0104 - 02 1.4.03	A. 0104 - 02 1.4.03	1 juta	1 juta	100%	100%	2,000,000	2,000,000	PENDAPDAH AS.3 CA08AH (PAD)	Hasil Pembiayaan Lain-lain (Sampul)	A. 0104 - 02 1.4.03	2,000,000		
1.05.01.02.01	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan	Hasil Pembiayaan Lain-lain (Sampul)	Materi Mula, Buletin, Raport, Kuesioner, dan lain-lain	Dukung ketercapaian aktivitas kerja masyarakat	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Desa, Kelurahan	A. 0104 - 02 1.4.03	A. 0104 - 02 1.4.03	1440 juta (1440000000000) rupiah	1440 juta (1440000000000) rupiah	100%	100%	15,900,000	15,900,000	PENDAPDAH AS.3 CA08AH (PAD)	Hasil Pembiayaan Lain-lain (Sampul)	A. 0104 - 02 1.4.03	300,750,000		
1.05.01.02	Penyalangan Jasa Penunjang Utama Penyelenggaraan Daerah											218,944,000	218,944,000				245,200,000		
1.05.01.02.01	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan	Hasil Pembiayaan Lain-lain (Sampul)	Materi Penyajian, Buletin, dan lain-lain	Dukung ketercapaian aktivitas kerja masyarakat	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Desa, Kelurahan	A. 0104 - 02 1.4.03	A. 0104 - 02 1.4.03	88 juta (88000000000) rupiah	88 juta (88000000000) rupiah	100%	100%	2,000,000	2,000,000	PENDAPDAH AS.3 CA08AH (PAD)	Hasil Pembiayaan Lain-lain (Sampul)	A. 0104 - 02 1.4.03	2,000,000		
1.05.01.02.01	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan	Hasil Pembiayaan Lain-lain (Sampul)	Bantuan informasi publik	Dukung ketercapaian aktivitas kerja masyarakat	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Desa, Kelurahan	A. 0104 - 02 1.4.03	A. 0104 - 02 1.4.03	12 juta	12 juta	100%	100%	1,400,000	1,400,000	PENDAPDAH AS.3 CA08AH (PAD)	Hasil Pembiayaan Lain-lain (Sampul)	A. 0104 - 02 1.4.03	1,940,000		
1.05.01.02.01	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan	Hasil Pembiayaan Lain-lain (Sampul)	Jasa Cetak	Dukung ketercapaian aktivitas kerja masyarakat	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Desa, Kelurahan	A. 0104 - 02 1.4.03	A. 0104 - 02 1.4.03	12 juta	12 juta	100%	100%	100,000,000	100,000,000	PENDAPDAH AS.3 CA08AH (PAD)	Hasil Pembiayaan Lain-lain (Sampul)	A. 0104 - 02 1.4.03	200,000,000		
1.05.01.02	Penyalangan Jasa Penunjang Utama Penyelenggaraan Daerah											711,344,000	648,544,000				1,584,940,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.25.0.00.2.02.01.0000 Satuan Fungsional Pemangku Fungsi
Sub Unit Organisasi : 1.25.0.00.2.02.01.0000 Satuan Fungsional Pemangku Fungsi

Kode	Uraian/ Billing Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022								Detail Penerimaan	Realisasi Mula Rencana Tahun 2022								
			Capaian Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sifat Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan			Page Indirect (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/ Paga Indirect (Rp.)				
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Tingkat Mula	Target					
1.25.01.21.00	Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Lainnya	Hasil Penelitian (AAP) yang terakreditasi	IC, SPI, or Kamus Kompleks Jurnal Majalah Respon multimedia Poster dan Pratinjau	Dukung kebercapaian akademik dan kualitas Pelayanan Daerah	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa, Semua Kabupaten	4.200/100 1.000	4.200/100 1.000	1.000	1.000	100%	100%	17.400.000	17.400.000	100%	100%	Hasil Penelitian (AAP) yang terakreditasi	4.200/100 1.000	17.400.000		
1.25.01.22.00	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Hasil Penelitian (AAP) yang terakreditasi	Artikel Jurnal Kebudayaan	Dukung kebercapaian akademik dan kualitas Pelayanan Daerah	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa, Semua Kabupaten	4.200/100 1.000	4.200/100 1.000	1.000	1.000	100%	100%	10.000.000	10.000.000	100%	100%	Hasil Penelitian (AAP) yang terakreditasi	4.200/100 1.000	10.000.000		
1.25.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMATAN DAN KETERTAMBAHAN UMUM												17.044.773.404	16.987.700.240					21.430.230.000	
1.25.02.21	Pengelolaan Kegiatan Kelembagaan dan Keaktifan Umum Tahun 1 hasil Daerah Kabupaten/Kota												6.291.493.490	6.326.432.851						11.381.580.000
1.25.02.21.01	Kelembagaan dan Keaktifan Umum	Kelembagaan yang terakreditasi	Kegiatan Kelembagaan yang terakreditasi yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Kelembagaan yang terakreditasi yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa, Semua Kabupaten	100/100 98,24%	100/100 98,24%	100/100 98,24%	100/100 98,24%	100%	100%	6.714.022.000	6.740.000.000	100%	100%	Kelembagaan yang terakreditasi yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	100/100 98,24%	6.291.493.490		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.25.00.2.02.01.000 Satuan Fungsional Pemangku
Sub Unit Organisasi : 1.25.00.2.02.01.000 Satuan Fungsional Pemangku

Kode	Uraian/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan	Realisasi Mula Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Page Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dasar Page Indikatif (Rp.)
						Program	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Page Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Totok Mula	Target					
1.25.02.201.01	<p>Subsidi dan Bantuan Operasional dan Kegiatan Lain-lain</p> <p>Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang</p>	<p>Penyusunan anggaran tahunan APBD Kabupaten Magelang</p> <p>Penyusunan anggaran program dan kegiatan</p> <p>Penyusunan anggaran kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang</p> <p>Penyusunan anggaran kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Sekolah</p>	<p>Kota Yogyakarta, Kota Magelang, Kota Sleman, Kota Sukoharjo</p>	100% (Rp. 85,24 B.)	100% (Rp. 85,24 B.)	14 (kegiatan)	14 (kegiatan)	100%	100%	15.555.075	15.555.075	<p>REKONSTRUKSI DAN PERAWAAN JALAN</p> <p>Dana Transfer Khusus Dana Regenerasi</p>	<p>Penyusunan anggaran APBD Kabupaten Magelang</p> <p>Penyusunan anggaran program dan kegiatan</p> <p>Penyusunan anggaran kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang</p>	<p>100% (Rp. 85,24 B.)</p> <p>100%</p>	<p>22.185.000</p>
1.25.02.201.01	<p>Kontribusi Pengembangan Kabupaten dan Kabupaten Lain-lain</p> <p>Untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang</p>	<p>Penyusunan anggaran tahunan APBD Kabupaten Magelang</p> <p>Penyusunan anggaran program dan kegiatan</p> <p>Penyusunan anggaran kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang</p> <p>Penyusunan anggaran kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Sekolah</p>	<p>Kota Yogyakarta, Kota Magelang, Kota Sleman, Kota Sukoharjo</p>	100% (Rp. 85,24 B.)	100% (Rp. 85,24 B.)	1 (kegiatan)	1 (kegiatan)	100%	100%	4.150.000	4.150.000	<p>REKONSTRUKSI DAN PERAWAAN JALAN</p>	<p>Penyusunan anggaran APBD Kabupaten Magelang</p> <p>Penyusunan anggaran program dan kegiatan</p> <p>Penyusunan anggaran kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang</p>	<p>100% (Rp. 85,24 B.)</p> <p>100%</p>	<p>4.150.000</p>

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

SKD Organisasi : 125.001.201.000 Satuan Polisi Pamong Praja
SKL SKH Organisasi : 1.01.2.00.2.02.21.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Uraian/Isi/Detail Struktur Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022										Catatan Khusus	Realisasi Mula Rencana Tahun 2022										
		Capaian Program	Kawasan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sektor Output/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)					Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebijakan Daklat Pagu Indikatif (Rp)							
						Program		Kelemban Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tidak Mula	Target								
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah												
		Memastikan Penyusunan Kerangka Kerangka yang melandasi perencanaan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan																							
TOTAL																		33.176.813.288	34.837.761.864					33.044.481.8	

BAB IV PENUTUP

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah dokumen yang menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Selain itu juga sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 dilengkapi dengan Matriks Renja, yang berisi Program/ Kegiatan, Capaian Program/ Kegiatan/ Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif. Harapan dari penguangan matriks tersebut adalah agar OPD dapat berjalan pada jalur perencanaan yang sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta

Demikian Renja Perubahan Satpol PP ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Yogyakarta, 2022

Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja

ttd

Drs. AGUS WINARTO